

21. IKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

INSTANSI : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan

FUNGSI :

1. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
2. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
3. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
5. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kematangan layanan teknologi informasi komunikasi	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Layanan Publik Online Terintegrasi : Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain	Jumlah layanan publik online dan terintegrasi/jumlah layanan publik x 100%	Laporan Indeks domain layanan SPBE	Bidang Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Hasil Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID oleh Komisi Informasi Provinsi	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Perencanaan Perangkat Daerah: Dokumen Renja Evaluasi Pembangunan: Dokumen LKj IP	Jumlah PD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah PD x 100%	Laporan penggunaan data statistik daerah	Bidang Statistik dan Persandian
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Nilai Per Area Keamanan Informasi: 7 Area Keamanan 1. Tata kelola 2. Pengelolaan Resiko 3. Kerangka Kerja 4. Pengelolaan Aset 5. Teknologi 6. Suplemen 7. Katagori SE	Jumlah nilai per area keamanan informasi /Jumlah area penilaian x 100 %	Laporan Indeks KAMI	Bidang Statistik dan Persandian